

## **ABSTRACT**

*Fraud is a intentionally fault which could harming many people. In government sector, fraud is harming for public. This study aims to identify and analyze the factors that influence the tendency of fraud in the government sector. Respondents in this study were Civil Servants (PNS) who worked in the Regional Work Unit (SKPD) in Ponorogo Regency. Pursuant to purposive sampling method, the total sample in this study was 60 respondents from 11 Regional Work Units (SKPD) in Ponorogo Regency. The hypothesis in this study using multiple linear regression analysis. These results indicate that distributive justice and the government's internal control system have an effect on the tendency of fraud (fraud). Meanwhile procedural justice, enforcement of regulations, organizational commitment and organizational culture have no effect against the tendency of fraud (fraud) in the government sector.*

*Keyword : the tendency to fraud (fraud), the government sector, distributive justice, procedural justice, government internal control systems, enforcement of regulations, organizational commitment, organizational culture.*

## ABSTRAK

Kecurangan merupakan kesalahan yang dilakukan secara sengaja yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam lingkup pemerintahan, kecurangan sangat merugikan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan metode purposive sampling, total sampel dalam penelitian ini adalah 60 responden dari 11 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo. Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil ini menunjukkan bahwa keadilan distributif dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*). Sementara itu keadilan prosedural, penegakan peraturan, komitmen organisasi dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah.

Katakunci : kecenderungan kecurangan (*fraud*), sektor pemerintah, keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi.